

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jakarta sebagai kota megapolitan memegang peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Purwanto (2025) menekankan betapa hingga kini, Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan kebudayaan di Indonesia. Sebab, mayoritas instansi pemerintah maupun swasta masih terpusat di Jakarta. Sebagai konsekuensinya, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi ini pun tergolong paling cepat dan maju. Jakarta juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang secara konsisten berada di atas rata-rata nasional pada periode 2010-2019 (Purwanto, 2025). Pertumbuhan ekonomi Jakarta hanya sempat melambat di tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 terjadi. Dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, Jakarta kerap disebut sebagai jantung bisnis Indonesia.

Di bidang pariwisata, Jakarta memiliki 216 destinasi wisata yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu *heritage*, *nature*, *urban*, *youth*, dan *culinary destination* (Purwanto, 2025). Sebagai wilayah dengan peluang ekonomi yang besar, Jakarta masih menjadi magnet bagi para pendatang (Velarosdela, 2021). Maka tidak mengherankan jika Jakarta menjadi rumah bagi 10,6 juta penduduk pada tahun 2023 (BPS, 2024) Jumlah ini diproyeksikan akan terus meningkat di masa depan (BPS, 2023). Kondisi ini menegaskan betapa krusialnya peran Jakarta dalam menunjang kehidupan banyak orang. Di balik citranya sebagai kota megapolitan, Jakarta secara alamiah sangat rentan terkena banjir. Hal ini dikarenakan iklim muson membawa curah hujan tinggi setiap

musim hujan dan posisi Jakarta yang terletak di dataran delta tempat 13 sungai bermuara (Texier, 2008). Dikarenakan letaknya yang berada di dataran rendah, sungai-sungai yang terdapat di Jakarta tidak mampu menampung air pada musim puncak hujan yang kemudian mengakibatkan banjir di beberapa daerah di Jakarta (Purwanto, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta selalu dilanda banjir setiap tahunnya (Pantau Banjir Jakarta, n.d.). Selain itu, Jakarta juga pernah mengalami banjir besar pada tahun 1997, 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, dan 2021, dengan banjir di tahun 2007 menjadi banjir terparah sepanjang sejarah Jakarta (Kusumanto et al., 2022). Kejadian banjir di tahun 2007 mengakibatkan lebih dari 60% area Jakarta terendam yang berdampak pada tewasnya 79 warga, pengungsian 500.000 penduduk, dan kerugian material hingga 9 triliun rupiah (Kusumanto et al., 2022).

Kerugian banjir di Jakarta bukan hanya sekadar angka. Banjir besar di Jakarta benar-benar berdampak secara nyata ke kehidupan masyarakat luas hingga melumpuhkan aktivitas sehari-hari warga. Misalnya, pada banjir besar di tahun 2020, masyarakat Jakarta tidak hanya direpotkan dengan rumah yang rusak akibat terendam oleh banjir, tetapi mereka juga harus mengalami krisis listrik, air bersih, dan mobilitas (Simanjuntak & Asril, 2020). Penelitian Marfai et al. (2015) menunjukkan bahwa banjir besar di Jakarta menghentikan kegiatan ekonomi di pasar tradisional yang mengakibatkan naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan penduduk tidak dapat bekerja dan menghasilkan uang. Di waktu yang bersamaan, sekolah ditutup dan anak-anak banyak mengalami penyakit seperti diare serta infeksi kulit. Dengan demikian, banjir besar dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Banjir di Jakarta disebabkan oleh faktor alami dan faktor manusia yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah pasang surut dan kenaikan permukaan air laut; pembangunan perkotaan dan pertumbuhan populasi; perubahan penggunaan lahan dan kerusakan lingkungan di daerah hulu dan sepanjang sungai; pembuangan limbah ke sungai; sistem drainase yang buruk; dan fenomena penurunan muka tanah (Abidin et al., 2015). Risiko banjir di Jakarta diperparah dengan adanya perubahan iklim dan pembangunan perkotaan yang terus terjadi

hingga saat ini. Januriyadi et al., (2018) memprediksi bahwa perubahan iklim dan pembangunan perkotaan (urbanisasi) dapat meningkatkan kerugian akibat banjir hingga 322% – 402% pada tahun 2050. Penurunan muka tanah yang terus terjadi juga meningkatkan frekuensi dan durasi banjir, membuat masyarakat semakin rentan terkena banjir (Deltares, 2015). Kondisi ini membuat Jakarta menjadi salah satu dari 20 kota di dunia dengan risiko banjir tertinggi di dunia (BRIN, 2022).

Risiko bencana yang terus meningkat ini menekankan pentingnya untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana agar masyarakat dapat merespons bencana dengan efektif (UNDRR, 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sementara itu, United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR) mendefinisikan kesiapsiagaan bencana sebagai pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh individu, masyarakat, lembaga profesional, dan pemerintah untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan dampak bencana (UNISDR, 2009). Sedangkan menurut International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), kesiapsiagaan bencana mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana (IFRC, 2000). Hal ini termasuk memprediksi bencana, mengurangi dampaknya terhadap populasi yang rentan, serta mengatasi konsekuensinya dengan efektif (IFRC, 2000). Berdasarkan berbagai definisi yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kesiapsiagaan bencana dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan, termasuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas, yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, ataupun lembaga yang bertujuan untuk mengantisipasi, merespons, serta memulihkan dampak bencana, terutama terhadap populasi rentan.

Kesiapsiagaan bencana menjadi krusial karena dapat membantu mengurangi angka kematian, jumlah korban, kerugian ekonomi, serta kerusakan akibat bencana (UNDRR, 2020). Merujuk pada Buku Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir yang dikeluarkan oleh BPBD Jakarta (BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2020), umumnya praktik kesiapsiagaan meliputi hal-hal yang perlu diperhatikan di saat tidak terjadi banjir, saat terjadi banjir, dan setelah banjir. Tindakan praktis

kesiapsiagaan bencana di antaranya yaitu menyiapkan tas darurat, menyimpan dokumen dan surat berharga di tempat aman, mengetahui jalur evakuasi dan peringatan dini, menjaga lingkungan tetap bersih, mewaspadaikan saluran air, listrik, dan binatang berbisa, serta evakuasi ke tempat yang aman.

Terlepas dari risiko banjir yang terus meningkat dan bencana banjir yang melanda setiap tahunnya, masyarakat Jakarta masih menunjukkan kesiapsiagaan bencana yang rendah. Hal ini dilihat dari kebiasaan masyarakat Jakarta yang masih suka membuang sampah di sungai, yang akhirnya membuat aliran air tersumbat (Dewi, 2022). Warga lebih memilih untuk membuang sampah di sungai karena dianggap lebih mudah daripada harus berjalan ke tempat pembuangan sampah (Dewi, 2022). Warga seolah merasa tidak memiliki tempat lain untuk membuang sampah karena sudah terbiasa membuangnya di sungai, hingga perilaku tersebut menjadi tindakan refleks yang dilakukan tanpa disadari (Dewi, 2022).

Fenomena lain yang membuktikan tingkat kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta masih rendah adalah tidak berfungsinya peringatan dini saat banjir. Ketika banjir besar terjadi di tahun 2020, sistem peringatan dini di Jakarta dilaporkan tidak berfungsi (Wijaya, 2020). Kejadian ini sangat disayangkan mengingat pemasangan sistem peringatan dini adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi banjir (Taryana et al., 2022). Ketiadaan peringatan dini membuat warga menjadi tidak siap menghadapi bencana banjir yang terjadi secara cepat. Setelah peristiwa tersebut, ratusan warga Jakarta menggugat pemerintah Provinsi Jakarta karena tidak berfungsinya sistem peringatan dini dan tidak adanya bantuan darurat di situasi banjir (CNN Indonesia, 2020). Keadaan ini sejalan dengan analisis terdahulu yang menemukan bahwa masyarakat Jakarta di daerah rawan banjir masih menunjukkan ketidaksiapsiagaan dalam menghadapi banjir (Husniawati & Herawati, 2023; Nastiti et al., 2021)

Rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat Jakarta juga terlihat dari pasifnya masyarakat merespons dampak bencana. Hasil kajian (Saputra, 2019) menunjukkan bahwa terdapat korban banjir yang merespons dampak banjir dengan tidak melakukan apa pun meskipun terdapat opsi untuk meninggikan lantai, memodifikasi rumah, atau relokasi ke tempat yang lebih aman. Terdapat dua alasan

mengapa beberapa orang memilih untuk tidak melakukan apa pun. Pertama, karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perbaikan, dan kedua, kerusakan yang terjadi belum terlalu parah (Saputra, 2020). Masyarakat yang memilih tidak melakukan apa pun adalah indikasi bahwa penerapan kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat Jakarta masih kurang efektif.

Salah satu variabel yang dapat memengaruhi kesiapsiagaan bencana adalah *place attachment*, yaitu keterikatan seseorang dengan tempat tinggalnya. Konsep *place attachment* merujuk pada hubungan emosional yang terbentuk antara individu atau kelompok dengan suatu tempat. Low & Altman (1992) mendefinisikan *place attachment* sebagai ikatan antara manusia dengan tempat. Sementara itu, (Mishra et al., 2010) menyebutkan bahwa *place attachment* sebagai ikatan emosional antara individu, kelompok, atau komunitas dengan lingkungan fisiknya. Ahli lain mendeskripsikan *place attachment* sebagai hubungan positif yang terbentuk dari interaksi perilaku, kognitif, dan afektif antara individu atau kelompok dengan berbagai tingkatan lingkungan sosiofisiknya (Brown et al., 2012). Dengan demikian, *place attachment* dapat dipahami sebagai ikatan emosional yang terbentuk melalui interaksi perilaku, kognitif, dan afektif antara individu, kelompok, atau komunitas dengan lingkungan sosiofisik tempat tinggalnya.

Kuatnya keterikatan masyarakat Jakarta terhadap tempat tinggalnya dapat menghambat pengadopsian kesiapsiagaan bencana masyarakat di Jakarta. Isu ini terlihat dari fenomena keengganan masyarakat Jakarta untuk evakuasi saat banjir terjadi. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi banjir adalah dengan cara mengevakuasi masyarakat terdampak banjir ke tempat pengungsian. Meskipun telah disediakan tempat pengungsian, masih ditemukan kondisi di mana warga Jakarta enggan mengungsi saat banjir karena tidak ingin meninggalkan rumahnya. Fenomena ini didasarkan pada studi Texier (2008) yang menunjukkan bahwa saat banjir di tahun 2007, warga di bantaran sungai Jakarta enggan mengungsi karena takut kehilangan harta benda yang diletakkan di rumah, sehingga puluhan orang meninggal akibat hipotermia, tenggelam, atau tersengat listrik. Hal ini sejalan dengan penelitian Voorst (2016) yang mengungkapkan bahwa warga di bantaran sungai Jakarta enggan untuk dievakuasi karena khawatir rumah mereka akan digusur saat mengungsi. Lokasi pengungsian yang dianggap terlalu jauh juga

menjadi alasan mengapa warga enggan mengungsi, seperti yang terjadi pada sebagian besar warga di wilayah Tegal Alur, Jakarta Barat, saat banjir di tahun 2022 lalu (Nurmansyah, 2022).

Strategi kesiapsiagaan banjir lainnya yang dianggap efektif adalah relokasi tempat tinggal (Bukvic et al., 2022). Namun, masih terdapat fenomena di mana masyarakat Jakarta enggan untuk direlokasi, sekalipun wilayahnya berada di kawasan yang berisiko tinggi mengalami banjir. Upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kerap kali dihadapkan dengan penolakan relokasi oleh masyarakat Jakarta itu sendiri (Silalahi, 2018). Faktor pekerjaan, biaya hidup yang lebih rendah, serta ikatan sosial dengan komunitas dan keluarga yang sudah terjalin di tempat tinggal menjadi alasan mengapa masyarakat bantaran sungai di Jakarta enggan direlokasi (Texier, 2008). Lebih lanjut, temuan Hellman (2015) mengonfirmasi bahwa masyarakat tetap tinggal di daerah rawan banjir karena kuatnya ikatan sosial mereka dengan tetangganya dan adanya keinginan untuk mempertahankan mata pencaharian. Lokasi tempat tinggal yang dekat dengan pelanggan, pasar, dan transportasi juga menjadi alasan mengapa masyarakat enggan meninggalkan tempat tinggalnya meskipun wilayahnya berada di daerah rawan banjir (Hellman, 2015).

Fenomena penolakan relokasi oleh masyarakat Jakarta menunjukkan bahwa *place attachment* dapat memengaruhi kesiapsiagaan bencana secara negatif. Hal ini dibuktikan oleh studi Bonaiuto et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa *place attachment* memunculkan keengganan untuk relokasi atau kecenderungan untuk kembali ke tempat tinggal yang berbahaya setelah relokasi. Keputusan ini biasanya dikaitkan dengan ketergantungan individu terhadap aktivitas ekonomi yang telah berjalan di tempat tinggalnya (Anacio et al., 2016). Bagi mereka, relokasi untuk menghindari banjir berarti sama dengan meninggalkan aktivitas ekonomi yang telah mapan dan rumah yang telah dibangun. Hal ini sejalan dengan temuan (Buchori et al., 2018) yang menunjukkan bahwa alasan utama seseorang tidak ingin relokasi adalah karena ikatan emosional terhadap tempat tinggal mereka, kedekatan dengan tempat kerja, kedekatan dengan fasilitas umum, dan keinginan untuk tinggal dekat dengan keluarga atau kerabat.

Di sisi lain, *place attachment* juga berperan dalam mendorong individu untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan (Mishra et al., 2010; Xu et al., 2018; Wang et al., 2021). Sebab, *place attachment* yang kuat dapat mendorong individu untuk melindungi diri dan komunitas mereka. Argumen ini didukung oleh studi Lie et al. (2023) yang menemukan bahwa individu yang memiliki keterikatan dengan tempat tinggalnya cenderung bersedia melakukan penanggulangan risiko bencana agar mereka dapat terus tinggal di tempat tersebut. Kokorsch & Gísladóttir (2023) juga menemukan bahwa komunitas dengan *place attachment* yang kuat cenderung lebih bersedia untuk melakukan kegiatan sukarela dan aksi lokal di tempat tinggalnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Wallis et al. (2022) yang membuktikan bahwa individu dengan keterikatan yang kuat terhadap lingkungan tempat tinggalnya cenderung memiliki intensi untuk bersiap-siaga dan lebih bersedia terlibat dalam aksi kesiapsiagaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *place attachment* berpotensi memunculkan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat. Hal ini karena keterikatan yang kuat terhadap tempat tinggalnya dapat menimbulkan keinginan untuk tetap berada di wilayah tersebut. Sebagai konsekuensinya, individu dengan sukarela melakukan upaya apa pun untuk tetap tinggal di tempat tinggalnya. Namun, di sisi lain, *place attachment* dapat menghambat tindakan kesiapsiagaan, seperti keengganan untuk evakuasi dan relokasi. Dengan demikian, hubungan *place attachment* dengan kesiapsiagaan bencana belum dapat diketahui secara pasti.

Kesiapsiagaan bencana juga dapat dipengaruhi oleh variabel *self-efficacy*. Dalam merespons situasi darurat seperti bencana, individu perlu meyakini bahwa usaha dan tindakannya dapat menghasilkan aksi yang efektif (Newnham et al., 2017). *Self-efficacy* dapat didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mencapai tujuan atau tugas tertentu dan menghasilkan perubahan positif (King, 2020). *Self-efficacy* menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukan seseorang dalam menghadapi rintangan dan pengalaman yang tidak menyenangkan (Bandura, 1977). Individu cenderung terlibat dalam suatu aktivitas atau perilaku tertentu ketika mereka merasa bahwa mereka mampu menangani situasi yang ada (Bandura, 1977). *Self-efficacy* menentukan seberapa

besar usaha yang akan dilakukan seseorang dalam menghadapi rintangan dan pengalaman yang tidak menyenangkan (Bandura, 1977).

Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, *self-efficacy* berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menginisiasi atau menyelesaikan perilaku preventif, protektif, maupun adaptif (Qiu et al., 2023). Qiu et al. (2023) menjelaskan bahwa peran *self-efficacy* dalam memotivasi kesiapsiagaan bencana dapat dipahami melalui kerangka konseptual *Protection Motivation Theory* (PMT). Menurut PMT, motivasi untuk melindungi diri, yaitu keputusan seseorang untuk melakukan perilaku perlindungan terhadap ancaman, terbentuk melalui kombinasi antara penilaian ancaman (*threat appraisal*) dan penilaian respons (*response appraisal*). Penilaian ancaman mengacu pada persepsi individu terhadap kerentanan (seberapa besar kemungkinan ia terkena dampak bencana) dan tingkat keparahan (seberapa serius dampak bencana tersebut). Sementara itu, penilaian respons mencakup persepsi individu atas kemampuannya untuk menghadapi ancaman, dengan kata lain, *self-efficacy*. Dalam konteks bencana, *self-efficacy* berfungsi sebagai faktor kunci yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan kesiapsiagaan (Paton, 2003).

*Self-efficacy* dalam situasi bencana dikenal dengan istilah *Disaster Response Self-Efficacy* (DRSE) atau *self-efficacy* tanggap bencana. Secara umum, *self-efficacy* tanggap bencana digunakan untuk menggambarkan tingkat keyakinan diri perawat dalam menjalankan kompetensi tanggap darurat saat bencana (Li et al., 2017). Konsep ini mengintegrasikan teori *self-efficacy* dari Bandura dengan kerangka kompetensi tanggap darurat yang idealnya dimiliki perawat (Li et al., 2017). Terdapat empat kompetensi penting dalam penanganan bencana, yaitu 1) perawatan terhadap komunitas, 2) perawatan terhadap individu dan keluarga, 3) perawatan psikologis, dan 4) perawatan bagi populasi yang rentan (ICN, 2019). Masyarakat perlu memiliki kompetensi-kompetensi tersebut karena dalam situasi bencana bantuan tidak selalu datang dengan segera, sehingga individu dituntut untuk mampu bertahan secara mandiri pada fase awal bencana.

Pada 72 jam pertama setelah kejadian bencana merupakan masa kekosongan otoritas (*vacuum of authority*), sehingga individu dan komunitas perlu membantu

satu sama lain tanpa bantuan eksternal (Takefuji, 2023). Sebab, bantuan eksternal yang diberikan kerap kali membutuhkan waktu untuk sampai di lokasi kejadian banjir. Pengalaman pada banjir besar sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan eksternal datang pada hari kedua banjir (Marfai et al., 2015) atau bahkan baru datang setelah banjir surut (Detikcom, 2025). Namun demikian, masyarakat di Jakarta terlihat masih bergantung dengan bantuan eksternal (Dwirahmadi et al., 2019). Situasi ini menunjukkan pentingnya memiliki *self-efficacy* dalam situasi bencana agar individu dapat menolong diri sendiri dan komunitas terdekat di sekitarnya sebelum datangnya bantuan.

Penelitian sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa *self-efficacy* berkorelasi secara positif dengan kesiapsiagaan bencana (Becker et al., 2013; Wurjatmiko et al., 2018; (Adams et al., 2019); (Sitohang & Saragi, 2023); Qiu et al., 2023; Lubis et al., 2024). Ini artinya, semakin tinggi *self-efficacy* seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana. Sebab, seseorang dengan tingkat *self-efficacy* yang tinggi akan memiliki keyakinan bahwa ia mampu menghadapi masalah sulit dan merasa yakin akan kemampuan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuk dalam menghadapi bencana (Lubis et al., 2024). Begitu pun sebaliknya, individu yang memiliki *self-efficacy* rendah cenderung tidak bertindak karena mereka menganggap diri mereka tidak kompeten menghadapi bencana. Terlepas dari pentingnya *self-efficacy*, studi terkait pengaruh *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana banjir pada populasi masyarakat Jakarta masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut.

Adapun dinamika *place attachment* dan *self-efficacy* dengan kesiapsiagaan bencana didasarkan pada fakta bahwa *self-efficacy* mampu memediasi hubungan *place attachment* dengan kesiapsiagaan bencana (Wang et al., 2021). Berangkat dari hasil analisis tersebut, peneliti menduga bahwa seseorang dengan *place attachment* yang kuat akan semakin mengenali karakteristik tempat tinggalnya, termasuk risiko-risiko yang melekat pada tempat tersebut dan bagaimana menghadapinya. Biasanya pengetahuan ini termanifestasi melalui pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang diwariskan dari generasi ke generasi (Kokorsch & Gísladóttir, 2023; Lie et al., 2023). Dengan bekal pengetahuan tradisional tersebut,

individu yang terikat dengan tempat tinggalnya lebih mungkin untuk memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, penelitian yang mengkaji *place attachment* dan kesiapsiagaan bencana masih menemukan hasil yang inkonsisten, di mana *place attachment* dapat memengaruhi kesiapsiagaan bencana secara positif (Mishra et al., 2010; Xu et al., 2018; Wang et al., 2021) ataupun secara negatif ((DeDominicis et al., 2015; Bonaiuto, 2016; Domingues et al., 2018). Oleh karena itu, pengaruh *place attachment* terhadap kesiapsiagaan bencana belum dapat diketahui secara pasti, sehingga penelitian *place attachment* terhadap kesiapsiagaan masih perlu dilakukan untuk memenuhi gap tersebut. Kondisi ini semakin didukung dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa *self-efficacy* perlu berkontribusi dalam dinamika antara *place attachment* dan kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengeksplorasi peran *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir. Penelitian ini turut mengikutsertakan variabel *covariates* seperti usia, jenis kelamin, dan pengalaman banjir sebagai variabel yang dikontrol karena karakteristik demografis ditemukan dapat memengaruhi kesiapsiagaan bencana (Xu et al., 2015; Thomas et al., 2015; Qiu et al., 2023; Davarani et al., 2023). Maka dari itu, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir dengan memperhitungkan usia, jenis kelamin, dan pengalaman banjir sebagai variabel kontrol.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat teridentifikasi adanya masalah sebagai berikut:

1. Jakarta merupakan wilayah yang rentan terkena banjir. Risiko banjir di Jakarta diprediksi akan terus meningkat di masa depan.
2. Kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir masih rendah.
3. Terdapat isu keterikatan terhadap tempat tinggal yang kuat pada masyarakat Jakarta, sehingga mengurangi tindakan kesiapsiagaan ketika banjir.
4. Studi pengaruh *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana banjir pada populasi masyarakat Jakarta masih terbatas.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pengaruh *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir. Pembatasan masalah ini dilakukan agar pembahasan mengenai pengaruh *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat dewasa awal di Jakarta dalam menghadapi banjir tidak meluas.

### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah terdapat pengaruh *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat dewasa awal di Jakarta dalam menghadapi banjir?”

### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat dewasa awal di Jakarta dalam menghadapi banjir.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait pengaruh *place attachment* dan *self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan bencana, terutama bencana banjir.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah bagi lembaga pemerintah, swasta, non-pemerintah dalam membuat kebijakan dan/atau upaya mengenai mitigasi bencana banjir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai panduan kesiapsiagaan oleh masyarakat.

